

**IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
(STUDI DI KABUPATEN JEMBER)**

Rohmat budi prastyo, 1510111099

Yanny Tuharyati, S.H, M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

[budiprasetyo1221@gmail.com](mailto:budiprasetyo1221@gmail.com)

**Abstrak**

**Latar belakang :** Di era globalisasi ini, sampah menjadi pusat perbincangan di masyarakat. Sampah sering kali menjadi penyebab terjadinya suatu bencana, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut juga terjadi di kabupaten Jember karena kurangnya kepedulian terhadap sampah. Ketidakpedulian tersebut terlihat dari banyaknya sampah yang ditingal dan dibuang sembarangan diberbagai tempat, seperti sungai, jalan ataupun tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sampah yang berada di daerah perkotaan bisa terlayani oleh truk pengangkut sampah dari pemerintah, “Pelayanan pengangkutan sampah oleh pemerintah belum menjangkau sampai wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan mengatasi sampahnya dengan cara membakar, menimbun, membuang ke sungai atau lahan kosong. Di dalam Pasal 12 ayat (1) ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. Karena dengan masyarakat mengetahui tata cara pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan tentunya volume sampah dapat berkurang dan masyarakat tidak terkena dampak negatif dari

sampah tersebut. Ada berbagai jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari ataupun proses alam yang jika dibiarkan begitu saja atau tidak dikelola dengan tepat akan berdampak pada permasalahan yang serius dikemudian hari. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa sampah yang dapat dikelola adalah “sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik”.

**Tujuan :** untuk menambah wawasan atau keilmuan mengenai implementasi pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember. **Metode :** dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, digunakan pendekatan undang undang atau disebut juga dengan *statute approach*. **Hasil :** Dalam implementasi pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 masih terdapat kendala dalam penerapannya, ada dua kendala yang dihadapi yaitu aspek institusi dan aspek masyarakat. Aspek institusi meliputi anggaran yang kurang, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum lengkap dan sumber daya manusianya sendiri yang belum memiliki inovasi dalam mengelola sampah. Kemudian untuk aspek masyarakat, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah. Masyarakat masih menganggap bahwa sampah adalah barang habis pakai yang tidak mempunyai nilai guna sehingga sampah hanya dibuang begitu saja dan tidak dikelola dengan baik. **Kesimpulan :** Implementasi pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 di kabupaten Jember belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dalam penerapannya, ada dua kendala yang dihadapi yaitu aspek institusi dan aspek masyarakat. Aspek institusi meliputi anggaran yang kurang, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum lengkap dan sumber daya manusia institusinya sendiri yang belum memiliki inovasi dalam mengelola sampah. Kemudian untuk aspek masyarakat, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah. Masyarakat masih menganggap bahwa sampah adalah barang habis pakai yang tidak mempunyai nilai guna sehingga sampah hanya dibuang begitu saja. Selain dua

aspek tersebut, di kabupaten Jember masih belum terdapat perda khusus yang mengatur tentang sampah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup masih mengupayakan akan dibutukan perda tentang sampah di Kabupaten Jember.

Kata Kunci : pemerintah daerah, lingkungan hidup, sampah



## Abstract

Background: In this globalization era, waste is the center of conversation in the community. Garbage is often the cause of a disaster, such as flooding and environmental pollution. This also happened in Jember district because of the lack of concern for waste. This ignorance can be seen from the amount of rubbish that is left behind and disposed of carelessly in various places, such as rivers, roads or places frequented by the community. Article 1 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2008 concerning Waste Management states that "waste is the remnant of human daily activities and / or solid natural processes". Garbage in urban areas can be served by garbage trucks from the government, "Garbage transport services by the government have not reached rural areas. Rural communities overcome their waste by burning, hoarding, dumping into rivers or empty land. In Article 12 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2008 states that "Every person in the management of household waste and similar waste household waste must reduce and handle waste in an environmentally sound manner". Because the public knows the procedures for managing environmentally sound waste, of course the volume of waste can be reduced and the community is not negatively affected by the waste. There are various types of waste generated from daily human activities or natural processes that if left unchecked or not managed properly will have a serious problem in the future. Article 2 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2008 states that the waste that can be managed is "household waste, household-like waste, specific waste". Objective: to add insight or knowledge regarding the implementation of article 12 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2008 concerning Waste Management in Jember Regency. Method: in the research and preparation of this legal writing, a statutory approach is used. Result: In the implementation of Article 12 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2008 there are still obstacles in its application, there are two obstacles encountered, namely the institutional aspects and the community aspects. Institutional aspects include the lack of budget, incomplete waste management facilities and infrastructure and its own human resources that do not yet have innovation in managing waste. Then for the community aspect, the lack of community awareness of waste. The community still considers that waste is a consumable item that has no use value so that garbage is just thrown away and not managed properly. Conclusion: Implementation of article 12 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2008 in Jember Regency has not been implemented. That is because there are obstacles in its application, there are two obstacles encountered, namely the institutional aspect and the community aspect. Institutional aspects include the lack of budget, facilities

and infrastructure for incomplete waste management and the human resources of the institution itself which do not yet have innovation in managing waste. Then for the community aspect, the lack of community awareness of waste. The community still considers that waste is a consumable item that has no use value so that garbage is just thrown away. In addition to these two aspects, in Jember district there are still no specific regulations governing waste. As explained in article 12 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2008 that further provisions regarding the procedures for implementing the obligation to manage household waste and similar household waste as referred to in paragraph (1) are regulated by regional regulations. To overcome this, the Department of the Environment is still working to make a perda on waste in Jember Regency needed.

Keywords: local government, environment, garbage

## **Pendahuluan**

Di era globalisasi ini, sampah menjadi pusat perbincangan di masyarakat. Sampah sering kali menjadi penyebab terjadinya suatu bencana, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut juga terjadi di kabupaten Jember karena kurangnya kepedulian terhadap sampah. Ketidakpedulian tersebut terlihat dari banyaknya sampah yang ditingal dan dibuang sembarangan diberbagai tempat, seperti sungai, jalan ataupun tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sampah yang berada di daerah perkotaan bisa terlayani oleh truk pengangkut sampah dari pemerintah, “Pelayanan pengangkutan sampah oleh pemerintah belum menjangkau sampai wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan mengatasi sampahnya dengan cara membakar, menimbun, membuang ke sungai atau lahan kosong. Di dalam Pasal 12 ayat (1) ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. Karena dengan masyarakat

mengetahui tata cara pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan tentunya volume sampah dapat berkurang dan masyarakat tidak terkena dampak negatif dari sampah tersebut. Ada berbagai jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari ataupun proses alam yang jika dibiarkan begitu saja atau tidak dikelola dengan tepat akan berdampak pada permasalahan yang serius dikemudian hari. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa sampah yang dapat dikelola adalah “sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik”.

### **Metode**

Dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, digunakan pendekatan undang-undang atau disebut juga dengan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini pendekatan masalah dipergunakan untuk menjawab pokok permasalahan tentang implementasi pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 di Kabupaten Jember.

### **Hasil**

Dalam implementasi pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 masih terdapat kendala dalam penerapannya, ada dua kendala yang dihadapi yaitu aspek institusi dan aspek masyarakat. Aspek institusi meliputi anggaran yang kurang, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum lengkap dan sumber daya manusianya sendiri yang belum memiliki inovasi dalam mengelola sampah. Kemudian untuk aspek masyarakat, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah. Masyarakat masih menganggap bahwa sampah adalah barang habis pakai yang tidak mempunyai nilai guna sehingga sampah hanya dibuang begitu saja dan tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan lingkungan. Faktor kebiasaan juga menjadi penyebab masyarakat tidak mengelola sampah dengan memperhatikan wawasan lingkungan. Dikarenakan

membuang sampah begitu saja dirasa lebih mudah dan cepat untuk dilakukan. Meskipun terdapat berbagai kendala, pihak Dinas Lingkungan Hidup tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menanggulangi timbunan sampah yang semakin banyak.

### **Kesimpulan**

Implementasi pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 di kabupaten Jember belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dalam penerapannya, ada dua kendala yang dihadapi yaitu aspek institusi dan aspek masyarakat. Aspek institusi meliputi anggaran yang kurang, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum lengkap dan sumber daya manusia institusinya sendiri yang belum memiliki inovasi dalam mengelola sampah. Kemudian untuk aspek masyarakat, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah. Kemudian selain dua aspek tersebut, di kabupaten Jember masih belum terdapat perda khusus yang mengatur tentang sampah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup masih mengupayakan akan dibutkannya perda tentang sampah di Kabupaten Jember.

### **Saran**

1. Segera dibuatkan peraturan daerah tentang sampah, supaya pengelolaan sampah di Jember lebih baik lagi.
2. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah lebih dilengkapi.
3. Untuk pelayanan pengangkutan sampah lebih diperluas, dikarenakan masyarakat pedesaan masih belum terlalu memperhatikan dampak negatif pengelolaan sampah yang tidak berwawasan lingkungan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku/Literatur**

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 1, Bandung: Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang-Perundangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur.

